

KURIKULUM MODIFIKASI DALAM PRAKTIK PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD AL-FIRDAUS

Holifurrahman

Universitas Terbuka, UPBJJ-Bogor

khalif_rahman@yahoo.com

Most of the schools selected as providers of inclusive education are generally not yet prepared. This study aims to provide an overview of modified curriculum management implemented with cluster and pull-out learning models for students with disabilities at SD Al-Firdaus Surakarta. They were awarded the best inclusive school at the national level in 2012. Qualitative research is used to produce a comprehensive description of managerial steps, starting from planning, organizing, implementing, and evaluating the modified curriculum with the cluster learning model and pulling out students with disabilities. Based on data obtained from interviews, observations, and documents, this study concluded that an inclusive school requires modification in many ways and adapting to the needs of individual students with disabilities.

Keywords: *inclusive education management; modified curriculum; cluster and pullout models*

Abstrak

Kebanyakan sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif umumnya belum memiliki kesiapan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran manajemen kurikulum modifikasi yang diimplementasikan dengan model pembelajaran klaster dan pull-out bagi siswa difabel di SD Al-Firdaus Surakarta yang pernah mendapatkan penghargaan sekolah inklusif terbaik tingkat nasional pada tahun 2012. Penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan paparan yang komprehensif mengenai langkah-langkah manajerial, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum modifikasi dengan model pembelajaran klaster dan pull-out bagi peserta didik difabel. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjadi sekolah inklusif diperlukan modifikasi dalam berbagai aspek kurikulum dan menyesuaikan kebutuhan peserta didik.

Kata-kunci: manajemen pendidikan inklusif; kurikulum modifikasi; model klaster dan *pull-out* siswa difabel

A. Pendahuluan

Layanan pendidikan bagi siswa difabel tidak dapat disamakan dengan peserta didik yang lain. Sekolah dan guru sebaiknya mengetahui model-model pembelajaran siswa difabel. Dari sekian banyak model, sekolah dan guru dapat memilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Vaughn, Bos & Schumn, seperti dikutip oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, penempatan Anak Berkebutuhan Khusus (siswa difabel) di sekolah inklusif di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai model, yaitu:

1. Kelas reguler (*full inclusion*), yaitu siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler sepanjang hari dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan yang digunakan siswa pada umumnya;
2. Kelas reguler dengan *cluster*, yaitu siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler dalam kelompok khusus;

3. Kelas reguler dengan *pull-out*, yaitu siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik/keluar dari kelas ke ruang bimbingan atau ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru pembimbing khusus;
4. Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull-out*, yaitu siswa berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru pembimbing khusus;
5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yaitu siswa berkebutuhan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru pembimbing khusus di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, tetapi dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama siswa lain di kelas reguler; dan
6. Kelas khusus penuh, yaitu siswa berkebutuhan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru pembimbing khusus di dalam kelas khusus yang ada pada sekolah reguler (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa., 2008, hlm. 6 - 10).

Anggun Dyah Anjarsari, Mohammad Efendy, dan Sulthoni pernah meneliti Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sidoarjo (Anjarsari dkk., 2018). Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif dengan persentase pada 105 sampel sekolah di Kabupaten Sidoarjo yang tersebar di 18 kecamatan yang dipilih dengan teknik *cluster* sampling (area sampling). Hasil penelitian menyuguhkan data model pembelajaran di Sekolah Dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagai berikut:

1. Model kelas reguler sebanyak 16%
2. Model kelas reguler dengan *cluster* sebanyak 14%
3. Model kelas reguler dengan *pull-out* sebanyak 28%
4. Model kelas reguler dengan *cluster* dan *pull-out* sebanyak 23%
5. Model kelas reguler dengan berbagai pengintegrasian sebanyak 14%
6. Model kelas khusus sebanyak 5%

Selain soal model pembelajaran, permasalahan lain yang terkait dengan belum terpenuhinya layanan individual bagi siswa difabel di sekolah inklusif berhubungan dengan kurikulum. Sebagaimana dipaparkan dalam lokakarya

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 7, No. 2,
Jul-Dec 2020*

“Pendidikan Inklusif Berkualitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste”, UNESCO pernah menengarai tiga permasalahan utama dalam implementasi pendidikan inklusif, salah satunya: kurikulum yang tersusun kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda. Kekakuan kurikulum dan kekurang-tanggapan sekolah terhadap kebutuhan individual siswa difabel ini tidak akan terjadi manakala sekolah melakukan modifikasi. Modifikasi kurikulum merupakan salah satu cara sekolah berpihak pada siswa difabel. Renato Operti, Spesialis Program Biro Internasional Pendidikan di UNESCO, mengingatkan pendidikan inklusi tidak kemudian mensyaratkan kurikulum yang terpisah karena itu justru akan menciptakan segregasi. Menurutnya, kurikulum pendidikan inklusi harus masuk dalam kurikulum arus utama (Kompas, 2009). Artinya, tidak perlu kurikulum khusus sebagaimana siswa difabel belajar di SLB. Tetapi, tidak juga dibiarkan mereka belajar sepenuhnya dengan sistem reguler. Maka, sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus menempuh langkah-langkah penyesuaian.

Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan manajemen kurikulum modifikasi dengan model pembelajaran *klaster dan pull-out* bagi siswa difabel di SD Al-Firdaus Surakarta?

Setting dan lokasi penelitian ini adalah SD Al-Firdaus, yang beralamat di Jl. Yosodipuro 107, Surakarta. Lokasi penelitian ini dipilih, karena SD Al-Firdaus Surakarta ditunjuk oleh pemerintah sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada tahun 2004. Selanjutnya, pada tahun 2011, SD Al-Firdaus ditetapkan sebagai salah satu model sekolah inklusif tingkat nasional. Setahun kemudian, pada tahun 2012, SD Al-Firdaus berhasil menyabet penghargaan sebagai penyelenggara pendidikan inklusi terbaik tingkat nasional dalam ajang "Anugerah Pendidikan Inklusif 2012" yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Hellen Keller International (HKI). Untuk mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut, SD Al-Firdaus harus menyisihkan 149 pesaingnya dari 33 provinsi di Indonesia.

Data dalam penelitian ini bersumber dari tiga jenis: 1) data transkripsi wawancara, 2) data observasi, dan 3) data dokumen. Pengumpulan data tersebut menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode non-statistik. Secara umum, langkah-langkahnya meliputi: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan dua acuan untuk mengetahui keabsahan data: 1) Kredibilitas, yaitu dengan triangulasi. (2) Transferabilitas, yaitu dengan dependabilitas dan konfirmasiabilitas.

*INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 7, No. 2,
Jul-Dec 2020*

B. Kurikulum Modifikasi di SD Al-Firdaus

Jumlah siswa difabel di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Hasil analisis dari Global Burden of Disease tahun 2004 didapatkan bahwa 15,3% populasi dunia (sekitar 978 juta orang dari 6,4 milyar estimasi jumlah penduduk tahun 2004) mengalami disabilitas sedang atau parah, dan 2,9% atau sekitar 185 juta mengalami disabilitas parah. Pada populasi 0-14 tahun prevalensinya berturut-turut adalah 5,1% (93 juta orang) dan 0,7% (13 juta orang). Sedangkan pada populasi usia 15 tahun atau lebih, sebesar 19,4% (892 juta orang) dan 3,8% (175 juta orang). Susenas 2012 mendapatkan penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas sebesar 2,45%. Peningkatan dan penurunan persentase penyandang disabilitas dipengaruhi adanya perubahan konsep dan definisi pada Susenas 2003 dan 2009 yang masih menggunakan konsep kecacatan, sedangkan Susenas 2006 dan 2012 telah memasukkan konsep disabilitas. Walaupun demikian, jika kita bandingkan antara Susenas 2003 dengan 2009 dan Susenas 2006 dengan 2012 terjadi peningkatan prevalansi (Infodatin, 2014, hlm. 1 – 2).

Berbicara tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, tidak bisa dilepaskan dari kurikulum dan model pembelajaran. Dua komponen ini sangat menentukan terpenuhi tidaknya kebutuhan individual anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran. Menurut Tarmansyah, sekolah inklusif dituntut melakukan penyesuaian kurikulum terhadap bakat dan potensi anak berkebutuhan khusus (Tarmansyah, 2007, hlm. 154). Lebih lanjut Tarmansyah menguraikan empat model kurikulum bagi siswa difabel,

yaitu: 1) duplikasi, 2) modifikasi, 3) substitusi, dan 4) omisi. Dari keempat model kurikulum tersebut, sekolah tahu yang lebih cocok bagi peserta didiknya (Tarmansyah, 2007).

INKLUSI:

Journal of

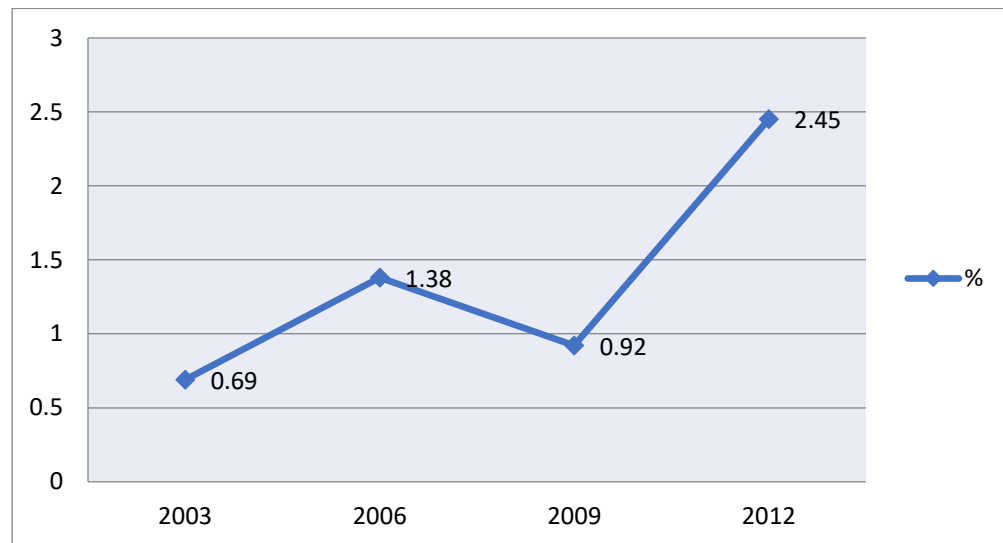
Disability Studies,

Vol. 7, No. 2,

Jul-Dec 2020

Gambar 1

Persentase jumlah penyandang disabilitas. Sumber: Infodatin (2014)



Jika di lapangan masih ditemukan penerapan kurikulum yang kaku dan tidak adaptif terhadap kebutuhan siswa difabel, mungkin dikarenakan minimnya pemahaman sekolah tentang bagaimana melakukan penyesuaian kurikulum. Dalam penelitian bertajuk Pengembangan Model Modifikasi Kurikulum Sekolah Inklusif Berbasis Kebutuhan Individu Peserta Didik, Abdul Salim (2010) menguraikan pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap panduan modifikasi kurikulum: a) sangat baik 46,93%, b) baik 32,65%, c) kurang baik 16,32%, dan d) 4% tidak baik.

1. Perencanaan

Perencanaan kurikulum modifikasi di SD Al-Firdaus Surakarta adalah serangkaian proses yang panjang, diawali dengan identifikasi peserta didik ketika awal masuk sekolah maupun awal tahun pelajaran baru. Melalui identifikasi ini, diketahui anak memiliki kebutuhan khusus atau tidak. Jika teridentifikasi berkebutuhan khusus, anak terlebih dahulu harus mengikuti

asesmen. Asesmen berbeda dengan evaluasi. Jika evaluasi dilaksanakan setelah pembelajaran, asesmen justru diberikan sebelumnya, atau setelah terdeteksi adanya kebutuhan khusus untuk menentukan program selanjutnya. Asesmen merupakan usaha untuk menghimpun informasi yang relevan guna memahami atau menentukan keadaan individu. Sebagai contoh, asesmen bagi difabel merupakan proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang relevan untuk mengetahui perilaku belajar anak, supaya memudahkan dalam penempatan pembelajaran. Bagi siswa difabel, asesmen merupakan upaya interdisipliner yang melibatkan berbagai profesi, seperti dokter, fisioterapis, ahli bina wicara, psikolog, psikiater, dan profesi terkait lainnya (Haryanto, 2010, hlm. 1 – 2).

Ada dua bentuk asesmen yang ditempuh SD Al-Firdaus Surakarta terhadap siswa difabel, yaitu formal dan informal. Secara formal, *asesmen* dilakukan oleh psikolog. Tujuannya, mendapatkan gambaran tentang aspek psikologis dan kecerdasan anak. Teknik yang dipakai psikolog adalah tes IQ dan wawancara. Adapun secara informal, asesmen dilakukan oleh guru, juga kolaborasi antara guru dan orang tua. Asesmen oleh guru melalui tes bertujuan untuk menggali kompetensi akademik anak. Adapun yang dilakukan bersama-sama oleh guru dan orang tua bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang perilakunya. Teknis pelaksanaan tes bagi siswa difabel bisa dilakukan secara tertulis, atau dimodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing.

Keseluruhan hasil asesmen, baik yang dilakukan oleh psikolog, guru, maupun orang tua, dikumpulkan untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sementara. Berdasarkan hasil kesimpulan sementara inilah kemudian dilakukan wawancara dengan orang tua siswa difabel. Langkah ini ditempuh untuk menyatukan pandangan supaya kebijakan, *treatment*, dan layanan individu yang diberikan sekolah terhadap siswa difabel mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Apabila di dalam wawancara tersebut tidak ditemukan kesepahaman antara orang tua dengan sekolah, maka siswa difabel tidak bisa dilayani. Sebaliknya, jika diperoleh kesepahaman, siswa difabel diterima untuk belajar di SD Al-Firdaus.

Sekolah dan orang tua juga harus menandatangani MOU untuk memperkuat kesepahaman itu. Selanjutnya, sekolah menyusun profil siswa difabel yang meliputi: identitas, identifikasi faktor akademis, identifikasi faktor kemandirian, identifikasi faktor kesehatan, identifikasi faktor sosial-emosi, identifikasi faktor keluarga, dan diagnosa ahli. Merujuk pada profil siswa difabel tersebut, selanjutnya diambil keputusan; apakah modifikasi diperlukan atau tidak dalam pembelajaran siswa difabel. Jika tidak, anak bisa langsung diproses pada penempatan.

Ada tiga hal yang dimodifikasi dalam pembelajaran siswa difabel, yaitu: modifikasi pembelajaran, modifikasi lingkungan, dan intervensi. Intervensi merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan inklusif. Intervensi dilakukan untuk membangun tingkah laku yang dikehendaki dan ada pula untuk meniadakan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Membangun tingkah laku yang dikehendaki dapat dilakukan dengan cara mengapresiasi agar siswa difabel terus melakukannya. Intervensi diberikan dalam waktu yang relatif lebih singkat, tetapi harus berturut-turut sampai anak mengalami perubahan. Inilah inti dari pelaksanaan proses pembelajaran. Bahwa tujuan-tujuan belajar direalisasikan melalui kegiatan intervensi (Sunanto, 2009). Meskipun dengan istilah yang berbeda, ketiga hal tersebut kurang lebih sama dengan yang dikemukakan oleh Charles dan Malianre bahwa sekolah inklusif model *mainstreaming* bukan sekadar menempatkan difabel di kelas biasa begitu saja dan membiarkan mereka “berenang atau tenggelam” sendiri (Sukadari, 2019, hlm. 21 – 22). *Mainstreaming* memerlukan modifikasi di kelas yang meliputi kurikulum, lingkungan dan fisik sekolah, proses dan hubungan sosial di kelas, serta struktur administrasi sekolah.

Dalam memodifikasi pembelajaran, tim inklusi melakukan bedah kurikulum bersama-sama. Kelima aspek kurikulum dikaji secara mendalam. Pertama, materi pelajaran. Dengan memerhatikan profil siswa difabel, tim inklusi menyusun penyesuaian materi pelajaran, apakah berupa eskalasi, duplikasi, modifikasi, substitusi, dan atau omisi. Kedua, metode pembelajaran. Tim inklusi mengkaji apakah pembelajaran siswa difabel akan menggunakan metode *cluster*, *mixed cluster*, dan atau *pull-out*. Ketiga, KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).

Bagi siswa difabel, ada dua kemungkinan KKM yang dipergunakan, yaitu: 1) sama angka, sama indikator, dan 2) sama angka, beda indikator. Keempat, evaluasi. Evaluasi dimaksud adalah pengambilan nilai, baik berupa ulangan harian, ujian tengah semester, maupun ujian akhir semester. Materi evaluasi disesuaikan dengan pembelajaran individual siswa difabel. Sementara itu, teknik evaluasinya juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa difabel, bisa berupa tes tulis dan bisa pula non-tulis. Hasil dari bedah kurikulum yang memerhatikan kelima aspek tersebut selanjutnya dituangkan menjadi “rumusan kebutuhan individual siswa difabel”. Rumusan inilah yang kemudian dipakai sebagai landasan penyusunan program *life skill* dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Penyusunan kurikulum modifikasi bagi siswa difabel di SD Al-Firdaus merupakan langkah awal dalam manajemen pendidikan inklusif. Hal ini sesuai dengan teori Hilda Taba yang mengatakan kurikulum adalah rencana pembelajaran atau *plan for learning* (Idi, 2014). Kurikulum sebagai sebuah perencanaan dipertegas oleh Abdullah dengan mengelompokkannya menjadi dua, yaitu: 1) Kurikulum yang berisikan suatu rencana yang merupakan pernyataan awal dari maksud (tujuan, cita-cita, sasaran), yakni apa yang harus dipelajari peserta didik. 2) Kurikulum sebagai sekumpulan pernyataan daripada hasil belajar yang dimaksudkan, yakni apa yang harus anak didik dapatkan (Idi, 2014, hlm. 32).

Kurikulum pendidikan inklusif di SD Al-Firdaus adalah kurikulum nasional dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian-penyesuaian tersebut disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan karakteristik peserta didik, utamanya siswa difabel. Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa kurikulum modifikasi adalah kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi (diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan siswa difabel dengan mempertimbangkan karakteristik (ciri-ciri) dan tingkat kecerdasannya (Ifdlali, 2010). Dalam pelaksanaannya, modifikasi terhadap kurikulum nasional yang dilakukan SD Al-Firdaus juga senada dengan penegasan Ifdlali, bahwa modifikasi kurikulum dilakukan terhadap alokasi waktu, isi/materi kurikulum, proses belajar-mengajar, sarana dan prasarana, lingkungan belajar, dan pengelolaan kelas. Bahkan, juga sesuai

dengan teori yang dikemukakan oleh Abdullah Idi, bahwa modifikasi kurikulum itu merupakan salah satu pengembangan kurikulum (Idi, 2014, hlm. 148). Adapun pengembangan terhadap kurikulum meliputi empat komponen di dalamnya, yaitu: tujuan, isi atau materi, proses, dan evaluasi.

*INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 7, No. 2,
Jul-Dec 2020*

SD Al-Firdaus melibatkan seluruh tim inklusi yang terdiri atas guru kelas, Guru Pendamping Khusus (GPK), *shadow teacher*, paedagog, dan psikolog untuk melakukan modifikasi terhadap kurikulum nasional. Sesuai dengan yang dikemukakan Wartomo bahwa sekolah inklusif melibatkan orang tua siswa difabel dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan dan/atau evaluasi pembelajaran (Wartomo, 2016, hlm. 210). Sekolah juga melibatkan tenaga ahli lain (seperti dokter, psikolog, guru SLB, guru BK, guru MP) dalam penyusunan program pendidikan individual. Hal itu diperlukan, karena untuk menyusun kurikulum pendidikan bagi siswa difabel perlu melibatkan pihak-pihak yang mengerti betul pendidikan inklusif dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, harus dibentuk tim pengembang kurikulum. Tim tersebut bisa terdiri dari guru yang mengajar di kelas inklusi, Guru Pembimbing Khusus (GPK), ahli pendidikan luar biasa (*orthopaedagog*), psikolog, dan orang tua siswa difabel. Tim tersebut dipimpin oleh kepala sekolah dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat.

Secara spesifik, untuk memodifikasi Rencana Program Pembelajaran (RPP), guru kelas bisa berkolaborasi dengan GPK. Hal ini untuk mengantisipasi hambatan, kesulitan dan kendala yang dapat dialami peserta didik selama mengikuti pembelajaran. GPK perlu menyelaraskan bahan ajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, GPK juga memberikan program kekhususan sesuai dengan jenis ketunaan yang ada (Supardjo, 2016, hlm. 12).

2. Pengorganisasian

Secara mendasar, konsep dan praktik penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi siswa difabel di berbagai belahan dunia saat ini mengacu kepada Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi pada Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994. Salah satu poin dalam dokumen tersebut adalah bahwa prinsip dasar dari sekolah inklusif adalah selama memungkinkan, semua anak

belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang ada. Sekolah inklusif harus mengenal dan merespons terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari para siswanya, mengakomodasi berbagai macam gaya dan kecepatan belajar, dan menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa melalui penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, pemanfaatan sumber dengan sebaik-baiknya, dan penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitarnya (Sunardi & Sunaryo, 2011, hlm. 186)

Di dalam ilmu manajemen, pengorganisasian adalah proses mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap individu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tetapi semua sumber daya yang dimiliki, termasuk uang, mesin, waktu, dan sebagainya (Huda, 2020). Singkat kata, pengorganisasian adalah pembagian peran supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama-sama. Dalam manajemen kurikulum modifikasi di SD Al-Firdaus, pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan inklusi juga diatur peranan dan fungsinya. Pengorganisasian kurikulum modifikasi ini tidak dapat dilepas dari profil siswa difabel yang telah disusun bersama-sama oleh tim inklusi dan terpetakan pembagian peran pihak-pihak terkait.

Ada tiga hal penting yang dimodifikasi dari pengorganisasian ini, yaitu: modifikasi peran *stakeholder*, modifikasi model pembelajaran, dan modifikasi lingkungan. Pertama, modifikasi peran *stakeholder*. Modifikasi ini dibagi menjadi dua: internal dan eksternal. Modifikasi internal oleh kepala sekolah dilakukan terhadap empat komponen, yaitu: penyesuaian siswa, penyesuaian struktur sekolah, penyusunan pedoman pendidikan inklusi, dan pemetaan tugas. Penyesuaian siswa ditempuh dengan melakukan sosialisasi tentang konsep pendidikan individu (PI), pendidikan karakter, dan pendidikan agama Islam. Hal ini bertujuan supaya seluruh siswa menghargai perbedaan dan mendukung terlaksananya pendidikan inklusi di SD Al-Firdaus Surakarta. Dalam penyesuaian struktur sekolah, kepala sekolah menunjuk koordinator inklusi, yaitu psikolog, juga tim inklusi yang terdiri atas guru kelas, Guru Bantu Khusus (GBK), terapis, konselor, dan *shadow teacher*.

Menurut Kitano dan Kirby, ada lima langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan program pembelajaran yang diindividualisasikan, yaitu: pembentukan tim PPI, asesmen (menilai) kebutuhan khusus anak, mengembangkan tujuan jangka panjang dan pendek, merancang metode dan prosedur pembelajaran, dan melakukan evaluasi kemajuan belajar anak (Rusyani, 2013, hlm. 7). Sementara Endang Rusyani mengemukakan bahwa penyusunan program diawali dengan membentuk Tim PPI (Rusyani, 2013). Tim ini memiliki tugas merancang dan menyusun program pembelajaran yang akan dikembangkan di kelas. Anggota tim terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja dan memiliki informasi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penyusunan program, misalnya: guru, kepala sekolah, psikolog, orang tua, konselor, *speech therapist*, pediatri dan konselor.

Kepala sekolah dalam hal ini memegang posisi sentral karena bertugas sebagai koordinator dan konsultan bagi anggota tim yang lainnya. Selain itu, Kepala Sekolah juga menyusun pedoman pelaksanaan pendidikan inklusi yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun kebijakan. Terakhir, Kepala Sekolah juga menyusun uraian tugas dari masing-masing yang terlibat dalam tim SD Al-Firdaus Surakarta.

Adapun secara eksternal, sekolah juga melakukan koordinasi maupun kerja sama dengan komite sekolah, masyarakat sekitar, dan pusat sumber belajar terdekat. Hal ini dilakukan supaya mereka semua ikut serta memberikan bantuan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi, baik berupa materi maupun saran pengembangan pendidikan individu (PI) yang berlangsung di SD Al-Firdaus Surakarta. Pentingnya menjalin kerja sama dengan warga luar sekolah semacam ini pernah disinggung dalam lokakarya nasional tahun 2004 yang menghasilkan Deklarasi Bandung. Salah satu isi deklarasi tersebut adalah menghimbau kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, serta seluruh lapisan masyarakat untuk menjamin setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, serta mendapatkan perlakuan yang manusiawi (Sunaryo, 2009, hlm. 7).

Kedua, modifikasi model pembelajaran. Apabila pembelajaran menggunakan model kluster, sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru kelas

dengan melakukan modifikasi RPP. Jika menggunakan model *mixed cluster*, maka pembelajaran menjadi tanggung jawab guru kelas dan GBK. Guru kelas yang menyusun RPP modifikasi, sedangkan GBK menyusun PPI (Program Pembelajaran Individu). Apabila menggunakan model *pull-out*, maka pembelajaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab GBK. Pada model ini, instrumen yang dipergunakan adalah PPI.

Ketiga, modifikasi lingkungan. Lingkungan dimaksud adalah alat atau sarana yang dibutuhkan oleh siswa difabel selama dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar. Di luar kelas misalnya, toilet khusus penyandang disabilitas. Adapun di dalam kelas, seperti kebutuhan terhadap kacamata, buku dengan huruf braille dan sebagainya.

Pengorganisasian sangat penting dalam manajemen pendidikan inklusif. Kepala SD Al-Firdaus dibantu Wakil Kepala Sekolah dan Koordinator Inklusi melakukan pengorganisasian kurikulum modifikasi bagi siswa difabel setelah selesai merumuskan kurikulum modifikasi. Kurikulum modifikasi yang mereka susun sebelumnya berfungsi sebagai perencanaan. Dalam pengorganisasian inilah ditentukan di kelas mana siswa difabel akan belajar; siapa guru kelas yang akan mengajar siswa difabel tersebut; perlukah ia didampingi seorang *shadow teacher*; siapakah GPK yang akan mendampinginya; perlukah melibatkan pedagog dalam pembelajaran; dan seberapa intens ia harus diobservasi oleh psikolog, dan sebagainya. Artinya, langkah pengorganisasian yang ditempuh oleh SD Al-Firdaus Surakarta ini sesuai dengan pandangan I Wayan Lanang Pastika dkk. yang mendefinisikan pengorganisasian sebagai proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya (Pastika dkk., 2017, hlm. 199).

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kurikulum di sekolah inklusif berpedoman pada RPP yang telah disusun. Salah satu prinsip penyusunan RPP adalah memperhatikan perbedaan individual peserta didik, antara lain menyangkut kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang

budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik (Malikah, 2018, hlm. 20). Berpijak pada prinsip inilah diperlukan modifikasi pada beberapa aspek.

Kurikulum modifikasi di SD Al-Firdaus Surakarta dilaksanakan dalam dua model, yaitu klasikal dan individual. Model klasikal, program pembelajaran disiapkan oleh guru kelas dengan menyusun RPP modifikasi, sedangkan untuk model individual disiapkan oleh GPK dengan menyusun PPI. RPP merupakan rencana pelaksanaan kurikulum modifikasi yang dilaksanakan Guru Kelas dengan sistem klaster, dengan bantuan *shadow teacher*. Artinya, siswa difabel belajar bersama siswa reguler di dalam kelas. Tetapi, keberadaannya di dalam kelas didampingi oleh seorang *shadow teacher*. Adapun PPI merupakan rencana pelaksanaan kurikulum individual yang dilaksanakan di ruang khusus atau di tempat lain di lingkungan sekolah dengan sistem *pull-out*.

Guru yang mengajar siswa difabel, RPP-nya divalidasi oleh Kepala Sekolah dan Koordinator Inklusi, sedangkan guru kelas reguler divalidasi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Di dalam RPP yang mengakomodasi siswa difabel dijelaskan bagian-bagian atau aspek-aspek yang dimodifikasi; materi/muatan pembelajaran, metode, atau KKM, atau evaluasi. Guru kelas dan GPK menyusun laporan harian capaian pembelajaran siswa difabel yang disampaikan kepada orang tua masing-masing melalui buku catatan khusus.

Seperti anak reguler, siswa difabel juga mengikuti evaluasi belajar, baik harian, tengah semester, maupun evaluasi akhir semester. Pelaksanaannya dimodifikasi sesuai kebutuhan individual masing-masing anak, bisa berupa modifikasi materi, alat, atau cara tes itu dilaksanakan. Jika hasil tes siswa difabel belum mencapai KKM, dilakukan remedial. Hasil tes siswa difabel dijadikan bahan laporan capaian hasil belajar dalam kurun waktu tertentu.

Orang tua siswa difabel mendapatkan dua jenis laporan: Pertama, laporan hasil belajar. Laporan ini menggunakan format rapor dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Kemendikbud), namun di kolom nama dibubuhi keterangan dalam kurung (...) bahwa ia peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, apabila siswa difabel tidak mengikuti KKM reguler, maka penjelasan tentang hal itu dibubuhkan di kolom “catatan

pengembangan diri”. Rapor ini juga dilampiri Laporan Perkembangan Siswa. Di dalam lampiran inilah dijelaskan indikator dari nilai yang telah dicapai, sebagaimana tertera dalam rapor. Kedua, laporan Program Pendidikan Individual, laporan ditulis dalam bentuk narasi. Di dalam laporan PPI ini dijelaskan indikator yang dipelajari dari setiap muatan pembelajaran berikut hasil yang telah dicapai. Bersama laporan ini disertakan Laporan Pendukung Program Pembelajaran Individu yang memaparkan pencapaian belajar Anak Berkebutuhan Khusus dalam delapan aspek: 1) Kemampuan mengikuti tugas, 2) Kemampuan bahasa, 3) Kemampuan sensomotorik, 4) Kemampuan akademik, 5) Kemampuan Bersosialisasi, 6) Kemampuan bina diri, 7) Emosi dan perilaku, 8) Potensi, dan 9) Tahajji (mengaji).

SD Al-Firdaus dapat disebut sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif karena tidak memberlakukan tes masuk, dan menerima peserta didik dengan kondisi apa pun. Perlakuan terhadap peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Sapon-Shevin, dikutip Sunardi (2012, h.7-8), mengemukakan lima karakteristik pendidikan inklusif: 1) Menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru bertanggung jawab menciptakan suasana kelas yang terbuka bagi semua anak dan menghargai perbedaan kemampuan, kondisi fisik, sosial-ekonomi, suku, agama, dan sebagainya. 2) Menerapkan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. Guru di kelas inklusif secara konsisten akan bergeser dari pembelajaran yang berdasarkan buku teks ke pembelajaran yang banyak melibatkan belajar kooperatif, tematik, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan asesmen secara autentik. 3) Menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Model kelas tradisional, yang menuntut seorang guru secara sendirian berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan semua anak di kelas, harus diganti dengan model bekerja sama antar murid, saling mengajar, dan secara aktif berpartisipasi dalam pendidikannya sendiri dan pendidikan teman-temannya. Semua anak berada di satu kelas bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk saling belajar dari yang lain. 4) Menghapus hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Meskipun guru selalu dikelilingi oleh orang lain, pekerjaan mengajar dapat menjadi profesi yang terisolasi. Aspek terpenting dari pendidikan inklusif

meliputi pengajaran dengan tim. Kerja sama tim antara guru dengan profesi lain diperlukan, seperti para profesional, ahli bina bahasa dan wicara, petugas bimbingan, psikolog, terapis, dan sebagainya. 5) Pendidikan inklusif melibatkan orang tua, seperti keterlibatan mereka dalam penyusunan Program Pengajaran Individual.

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 7, No. 2,
Jul-Dec 2020

Kurikulum pendidikan di SD Al-Firdaus ada tiga, yaitu: 1) kurikulum nasional, 2) kurikulum nasional yang dimodifikasi sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik, dan 3) PPI (Program Pembelajaran Individu) atau IEP (Individual Educational Program) yang dikembangkan berdasarkan kurikulum khusus. Dua terakhir dari ketiga jenis kurikulum tersebut diperuntukkan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ifdlali bahwa kurikulum pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi (diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan siswa difabel, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya (Ifdlali, 2010). Maka, modifikasi kurikulum secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) modifikasi bagi peserta didik *gifted* atau *talented*, yaitu dengan memperluas, menaikkan, dan meningkatkan pembelajaran. 2) Modifikasi bagi anak yang memiliki hambatan belajar, yaitu dengan menurunkan tujuan, materi, dan evaluasi pembelajaran, serta menyesuaikan metode dan waktu pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik.

Dalam menyusun kurikulum modifikasi, SD Al-Firdaus melibatkan tim inklusi, dengan mengacu pada hasil asesmen dan kondisi terakhir siswa difabel. Hal ini sesuai teori yang dikemukakan oleh P4TK-SB (2019) bahwa mengenal karakteristik peserta didik salah satu bagian dari beberapa tuntutan atas kemampuan pedagogi yang harus dikuasai profesi Guru. Ini bertujuan untuk menemukan dan membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang baik di ruang kelas. Rancangan pembelajaran yang kondusif akan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga mampu meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang diinginkan.

Dalam penyusunan kurikulum modifikasi, SD Al-Firdaus juga memetakan model pembelajaran bagi siswa difabel: klaster, *pull-out*, atau kombinasi dari keduanya. Dalam pelaksanaannya, secara umum SD Al-Firdaus menerapkan

gabungan dari kedua model pembelajaran tersebut. Artinya, sekali waktu siswa difabel belajar dengan model klaster, dan sekali waktu juga belajar dengan model *pull-out*. Melihat model pembelajaran di SD Al-Firdaus Surakarta yang seperti itu, berarti menganut model pendidikan inklusif parsial. Model parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas *pull-out* dengan bantuan guru pendamping khusus (Rosliana & Hizriyani, 2019, hlm. 36). Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Vaughn, Bos & Schumn dalam Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, bahwa di dalam kelas reguler dengan *cluster* dan *pull-out*, siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler/inklusif dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik/keluar dari kelas reguler/inklusif ke ruang bimbingan/ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus/guru pembimbing khusus (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa., 2008, hlm. 6 – 10). Artinya, peserta didik difabel mengikuti sebagian pembelajaran di kelas reguler, dan sebagian lagi di kelas-kelas *pull-out* dengan bantuan Guru Pendamping Khusus (GPK).

SD Al-Firdaus juga menentukan KKM untuk mengukur pencapaian pembelajaran bagi siswa difabel. Penyusunan KKM bagi Anak Berkebutuhan Khusus bersifat khusus, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dalam praktiknya, tidak semua siswa difabel memiliki KKM yang sama dengan peserta didik reguler, tetapi tidak semua siswa difabel juga memiliki KKM yang berbeda dengan mereka.

Sebagai pertanggungjawaban kepada orang tua dan sekolah, dibuatlah tiga jenis laporan, yaitu: 1) Laporan harian, 2) Laporan hasil belajar yang dilampiri Laporan Perkembangan Siswa, dan 3) Laporan Program Pembelajaran Individu yang dilampiri Laporan Pendukung Program Pembelajaran Individu. Waktu pelaporan kepada orang tua siswa difabel ada yang bersifat harian, triwulanan, dan semesteran. Laporan Laporan-laporan itu juga berfungsi untuk memantau progres peserta didik berkebutuhan khusus dari waktu ke waktu. Dari rekam jejak itulah akan ditentukan keikutsertaan peserta didik berkebutuhan khusus di Ujian Nasional. Kalaupun tidak mengikuti

Ujian Nasional, peserta didik berkebutuhan khusus akan diikutsertakan dalam ujian jalur khusus guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

4. Pengendalian

Pengendalian kurikulum modifikasi di SD Al-Firdaus Surakarta dilakukan oleh kepala sekolah, dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan koordinator Inklusi. Dalam pelaksanaannya, pengendalian dilakukan melalui tiga tindakan, yaitu: 1) *monitoring*, 2) supervisi, dan 3) evaluasi pembelajaran.

Monitoring dilakukan setiap hari, baik oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan koordinator inklusi. Ada tiga hal yang menjadi fokus *monitoring*, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. *Monitoring* terhadap perencanaan ditempuh untuk memeriksa ulang konsep kurikulum pendidikan inklusi yang telah disusun. Apabila ditemukan ketidaksesuaian yang substansial, maka akan dilakukan pembahasan ulang untuk mendapatkan kesepakatan. Adapun jika ketidaksesuaian didapati dalam hal teknis, cukup dilakukan evaluasi dan perbaikan. Sementara itu, *monitoring* terhadap pengorganisasian berfungsi sebagai penilaian kinerja pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan inklusi. Jika ditemukan penempatan personel yang tidak tepat, akan dilakukan mutasi. Namun, jika ditemukan personel dengan kinerja buruk, dilakukan penilaian dan atau demosi. Adapun terhadap pelaksanaan, *monitoring* bertujuan untuk memantau pembelajaran siswa difabel sebagaimana yang telah direncanakan. Pun untuk mengetahui kendala yang ditemukan di lapangan, supaya segera dicarikan jalan keluarnya.

Sementara itu, supervisi dilakukan dengan dua cara, yaitu terjadwal dan dadakan. Supervisi yang dilakukan secara dadakan dinilai lebih efektif, karena mendorong para guru untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik, termasuk terhadap siswa difabel. Berbeda dengan *monitoring*, supervisi dilakukan terhadap aspek-aspek tertentu yang telah disepakati bersama oleh tim inklusi.

Data dan temuan dari ketiga aspek pengendalian kurikulum modifikasi dengan model pembelajaran klaster dan *pull-out* bagi siswa difabel di SD Al-

Firdaus Surakarta ini dijadikan bahan penyusunan RKTL (Rencana Kerja Tindak Lanjut).

Setidaknya ada dua kegiatan utama di SD Al-Firdaus yang dapat dikelompokkan ke dalam pengendalian kurikulum modifikasi bagi siswa difabel, yaitu: 1) supervisi dan *monitoring*, dan 2) evaluasi pembelajaran. Pengendalian kurikulum modifikasi bagi siswa difabel dimaksudkan untuk mengontrol dan mengawasi agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan memastikan tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai.

Supervisi ada yang dilakukan secara terjadwal, tetapi sering kali dilakukan secara dadakan. Supervisi dan *monitoring* ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan dibantu wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan koordinator inklusi.

Adapun evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkala. Dalam pelaksanaannya, evaluasi pembelajaran bagi siswa difabel di SD Al-Firdaus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Penyesuaian dan modifikasi dilakukan terhadap beberapa aspek, seperti tingkat kesulitan, bahasa, dan teknik evaluasi. Modifikasi ini perlu, karena setiap peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dari segi metode, media, maupun bentuk evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya (Wibowo, 2015, hlm. 104). Evaluasi bagi Anak Berkebutuhan Khusus harus memerhatikan beberapa hal: 1) evaluasi berdasarkan program individual, 2) laporan hasil kemajuan atau perkembangan siswa hendaknya dilengkapi dengan laporan berbentuk penjelasan atau informasi secara narasi, 3) perlu mempertimbangkan kondisi atau jenis siswa difabel, dan 4) untuk kondisi tertentu, evaluasi bisa melalui media gambar, seperti bagi mereka yang mengalami hambatan membaca.

C. Kesimpulan

Sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, SD Al-Firdaus menyiapkan tiga macam kurikulum, yaitu: 1) kurikulum nasional, 2) kurikulum nasional yang dimodifikasi sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik, dan 3) PPI (Program Pembelajaran Individu) atau IEP (Individual Educational

Program) yang dikembangkan berdasarkan kurikulum khusus. Modifikasi kurikulum dilakukan pada alokasi waktu, isi/materi kurikulum, proses atau metode belajar-mengajar, sarana dan prasarana, lingkungan belajar, pengelolaan kelas, evaluasi pembelajaran, dan pelaporan.

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 7, No. 2,
Jul-Dec 2020

Dengan mengacu pada hasil asesmen dan kondisi terakhir siswa difabel, sekolah memetakan model pembelajaran yang cocok; klaster, *pull-out*, atau kombinasi dari keduanya. Dalam pelaksanaannya, secara umum SD Al-Firdaus menerapkan gabungan dari kedua model pembelajaran tersebut. Artinya, sekali waktu siswa difabel belajar dengan model klaster, dan sekali waktu juga belajar dengan model *pull-out*. Melihat model pembelajaran di SD Al-Firdaus Surakarta yang seperti itu, berarti menganut model pendidikan inklusif parsial, yang di Indonesia lebih dikenal dengan model *mainstream*.

D. Pengakuan

Tulisan ini bersumber dari tesis yang telah diujikan pada Program Administrasi Pendidikan, Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor, pada tahun 2017. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala sekolah, Koordinator Inklusi, dan Psikolog SD Al-Firdaus, dan kepada para pembimbing tesis di Pascasarjana Universitas Pakuan, Ibu Dr. Hj. Rita Retnowati, M.S. dan Bapak Dr. H. Eka Suhardi, M.Si.

REFERENSI

- Anjarsari, A. D., Efendy, M., & Sulthoni. (2018). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sidoarjo. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 1, 91. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v1n2.p91-104>
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2008). *Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan dalam Pendidikan Inklusif*. Depdiknas.
- Haryanto. (2010). *Diklat Bahan Kuliah: Pengantar Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus*. Jurusan Pendidikan Luar Biasa, FIP-Universitas Negeri Yogyakarta.
- Huda, N. (2020, Juni 5). *Fungsi Pengorganisasian dalam Manajemen*.
- Idi, A. (2014). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik* (Ed. 1, cet. 1). Rajagrafindo Persada.
- Ifdlali. (2010). Pendidikan Inklusi, Pendidikan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus [Sekolah]. *SMANJ*. <http://smanj.sch.id/index.php/arsip-tulisan-bebas/40-artikel/115-pendidikan-inklusi-pendidikan-terhadap-anak-berkebutuhan-khusus>
- Infodatin. (2014). *Penyandang Disabilitas*. Pusdatin Kementerian Kesehatan RI.
- Kompas. (2009, November 4). *Pendidikan Inklusi Masih Banyak Kendala* [Berita]. KOMPAS.com. <https://edukasi.kompas.com/read/2009/11/04/0856498/pendidikan-inklusi.masih.banyak.kendala>
- Malikah, N. (2018). Modifikasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Menghapal Hadist di Madrasah Ibtidaiyah. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 10(02), 13–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3559253>
- Pastika, I. W. L., Santanu, G., & Marheni, K. E. (2017). Penerapan Konsep Pengorganisasian dan Pengarahan pada PT Bayus Cargo Badung, Bali. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(3), 197–205.
- Roslina, L., & Hizriyani, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah PAUD. *Motiva: Jurnal Psikologi*, 2(1), 32–36. <https://doi.org/10.31293/mv.v2i1.4313>
- Rusyani, E. (2013). *Pengembangan Model Pembelajaran Maternal Reflektif dalam Bahasa Indonesia di SLB. B (Anak Tunarungu)* [Masters, Universitas Pendidikan Indonesia]. <http://repository.upi.edu/1046/>
- Sukadari. (2019). *Model Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus* (1 ed.). Kanwa Publisher.
- Sunanto, J. (2009). Indeks Inklusi dalam Pembelajaran di Kelas yang Terdapat ABK di Sekolah Dasar. *Jassi Anakku*, 8(2), 78–84.
- Sunardi, S., & Sunaryo, S. (2011). Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya). *Jassi Anakku*, 10(2), 184–200.

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,*
Vol. 7, No. 2,
Jul-Dec 2020

- Sunaryo. (2009). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Fakultas Pendidikan Luar Biasa UPI.
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195607221985031-SUNARYO/Makalah_Inklusi.pdf
- Supardjo. (2016). *Pengelolaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Negeri III Giriwono Wonogiri* [S2, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
<http://eprints.ums.ac.id/42660/>
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi: Pendidikan untuk Semua*. Depdiknas.
- Wartomo, W. (2016). Pelaksanaan Model Pendidikan Inklusif di Sekolah Wilayah D.I Yogyakarta. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 197–220.
<https://doi.org/10.14421/mjsi.11.1340>
- Wibowo, H. S. (2015). Metode Evaluasi Pembelajaran Inklusif bagi Peserta Didik Difabel Netra. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 2(1), 87–108. <https://doi.org/10.14421/ijds.020105>